



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggara pemerintah kampung, perlu adanya pedoman tentang pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika Nomor 403/030/2021, Perihal Perubahan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021, tanggal 22 Maret 2020, maka perlu dilakukan perubahan sesuai usulan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ddiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
19. Peraturan Menteri Desa, Pemabngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asasi usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019, tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa.
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik – Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Distrik adalah Kepala Daerah yang mengepalai wilayah kerja Distrik.
5. Kampung adalah Kampung atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung.
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar ;
- b. alokasi afirmasi ;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung – Kampung dengan Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan dana kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian Hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli kampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan presentase capaian (*output*) Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistic dengan bobot :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Perhitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formulas sebagai berikut :

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3)\} + (0,25 * Z4) + AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung.
Z1 = Rasio jumlah Penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Mimika.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Mimika.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Mimika.
Z4 = Rasio IKG setiap Kampung Kabupaten Mimika.
AF = Alokasi Formula Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kampung berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan ;
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);

- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung dan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Kampung.
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh persen).
 3. Peraturan Kampung tentang Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2021.
 4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 – 2018 RKD antara Pemerintah Daerah – Pemerintah Kampung.
 - c. tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana kampung Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata – rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan table reverensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Kepala Kampung menyampaikan table reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk diverifikasi.
- (8) Dalam hal table reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan untuk data, kepala kampung menyampaikan perubahan tabel reverensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk Kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Kampung melalui:

1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Kampung, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung, meliputi:

- a. pembentukan, Pembangunan, dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung/ Badan Usaha Milik Kampung bersama untuk pertumbuhan Ekonomi Kampung merata;
 - b. penyediaan Listrik kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan Usaha ekonomi Produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha milik Kampung/Badan Usaha milik Kampung bersama untuk mewujudkan Konsumsi dan Produksi Kampung sadar Lingkungan.
2. Program Proiritas Nasional Sesuai kewenangan Kampung diprioritaskan untuk pencapaian:
 - a. pendataan Kampung, Pemetaan Potensi dan Sumber Daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
 - b. pembangunan Kampung Wisata untuk Pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - c. penguatan ketahanan Pangan dan pencegahan *Stunting* di Kampung untuk mewujudkan Kampung tanpa Kelaparan; dan
 - d. kampung Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan Perempuan Kampung, Kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.
 3. Adaptasi Kebiasaan Baru Kampung diprioritaskan untuk pencapaian pencapaian SDGs Kampung, antara lain:
 - a. mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera melalui Kampung aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan kampung tanpa Kemiskinan melalui bantuan Langsung Tunai Dana Kampung.
 4. Bantuan Langsung Tunai dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN PROIRITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Pemerintah Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (4) Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui Swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan Pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai Pengembangan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui Swakelola oleh Kampung atau Badan Kerjasama antar Kampung.
- (5) Swakelola oleh Badan Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pemantauan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :

- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan / atau
- b. Capaian keluaran Dana Kampung.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdapat sisa Dana Kampung di RKK, Bupati :

- a. meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan / atau
- b. meminta aparat fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), (5) dan (8);
 - b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan / atau penggunaan dana kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang di tunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung di RKUN.
- (3) Bupati melapaorkan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kepala Kampung melakukan rekonsiliasi data komulatif dana kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK dengan Bupati paling lambat tanggal 16 April 2021.
- (2) Kepala Kampung menyetorkan komulatif sisa dana Kampung Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2021.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa dana kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data Komulatif sisa Dana Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik Dana Kampung paling lambat akhir Mei 2021.

- (4) Bupati menyetorkan sisa komulatif dana kampung di RKK dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 4 Maret 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

Kontrol Penghitungan		Selanj.
Pada Dana Desa Kas/ Keca	151.067.450.000	
Hasil Penjualan Pada Desa	151.067.450.000	
Pada Abstrak Dasar Kas/ Zcst	74.449.312.000	
Hasil Hilang Abstrak Dasar Kas/ Zcst	74.449.312.000	
Pada Abstrak Afirmasi Kas/ Zcst	4.976.147.000	
Hasil Hilang Abstrak Afirmasi	4.976.147.000	
Pada Abstrak Kinerja Kas/ Zcst	3.745.889.000	
Hasil Hilang Abstrak Kinerja	3.745.889.000	
Pada Abstrak Formula Kas/ Zcst	67.896.002.000	
Hasil Hilang Abstrak Formula	67.896.002.000	
Jumlah Desa	133	
Jumlah Desa Pemerintah AS	13	

Revisi	Revisi
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
LSG	30%

Abstrak Per Desa	
Abstrak Afirmasi	171.591.000
Abstrak Kinerja	343.183.000
Abstrak Formula	288.159.000

AD Desa per Kluster	
Kluster JP	AD Desa
1	481.572.000
2	581.372.000
3	641.572.000
4	722.372.000
5	801.572.000

Revisi SPMD (1)
(seksi II)

Mengajukan:

Revisi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (9)
(seksi II)

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY
Petugas Penghitung Dana Desa (6)
(seksi III)



Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG